



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

DONI RINALDI
NPM 1615210038

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKOTA MEDAN

NAMA : DONI RINALDI
N.P.M : 1615210038
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ekonomi Pembangunan
TANGGAL KELULUSAN : 19 Juni 2023

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Zata Hasyiyati, S.E., M.AppEc., M.Si

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Toyib Daulay, S.E., M.M.

PEMBIMBING II



Dr. E Diwayana Putri Nasution, S.E., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DONI RINALDI
NPM : 1615210038
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas royalti non-eksklusif kepada unpub untuk menyimpan, mengalihkan-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 19 Juni 2023



DONI RINALDI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DONI RINALDI
NPM : 1615210038
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA MEDAN

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 19 Juni 2023



DONI RINALDI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas ke variabel terikat, dimana dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah*”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data times series dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Berdasarkan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0, Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan oleh semua faktor (Pdrb, Jumlah Penduduk, Dau, Dak, Dbh Pajak, Belanja Barang, Belanja Pegawai, Dan Belanja Subsidi) yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, maka terpilihlah 2 variabel relevan yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yaitu variabel jumlah penduduk dan variabel dana bagi hasil. Yang dimana nilai pada tabel *rotated component matrix* untuk variabel jumlah penduduk sebesar 0,956 sedangkan dana bagi hasil memiliki nilai sebesar 0,920.

Kata kunci : Pdrb, Jumlah Penduduk, Dau, Dak, Dbh, Belanja pegawai, Belanja Barang, Belanja Subsidi dan Pad.

ABSTRACT

This study aims to see the influence of the independent variables to the dependent variable, which is entitled "Analysis of Factors Affecting Local Own Income". In this study, researchers used times series data from 2010 to 2017. Based on the results of data processing using the SPSS version 16.0 application, based on the results of tests that have been carried out by all factors (Pdrb, Total Population, Dau, Dak, Dbh Pajak (Goods Expenditures, Personnel Expenditures, and Subsidized Expenditures) which affect the region's own income, then 2 relevant variables that affect local revenue are selected, namely the population size variable and the profit sharing variable. Which is where the value in the rotated component matrix table for the population variable is 0.956 while the profit sharing fund has a value of 0.920.

Keywords: Pdrb, Total Population, Dau, Dak, Dbh, Personnel Expenditures, Goods Shopping, Subsidized Spending and Pad.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sampai saat ini sehingga penulis menyelesaikan skripsi untuk dapat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Adapun judul yang penulis sajikan adalah sebagai berikut : **”Analisis Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan”**.

Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda Edi Yusri, S.H dan Ibunda Lely Silvia yang selalu memberikan semangat dan doa serta pengorbanan moril, yang tidak dapat dinilai dengan apapun.
3. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dr. Bakhtiar Efendi , SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Bapak Dr Muhammad Toyib Daulay, SE., MM selaku dosen pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan arahan, motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini

6. Ibu Dr. E. Diwayana Putri Nasution, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II penulis yang sudah memberikan banyak saran, masukan, motivasi, serta kemudahan di dalam pembuatan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah mengajarkan ilmunya selama perkuliahan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan..
8. Seluruh Staff pegawai departemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
9. Serta kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi-motivasi dalam perkuliahan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang akan digunakan demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi teman-teman dan pembaca lainnya.

Medan, 19 Juni 2023

Penulis

DONI RINALDI

NPM:1615210038

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN UJIAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Keaslian Penelitian.....	17

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	18
1. Pendapatan Asli Daerah	18
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	20
3. Jumlah Penduduk	23
4. Dana Alokasi Umum	27
5. Dana Alokasi Khusus	29
6. Dana Bagi Hasil	30
7. Belanja Daerah	31

B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Konseptual	37
D. Hipotesis	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian	40
B. Definisi Operasional Variabel	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Metode Analisis Data.....	42

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	46
B. Hasil Penelitian.....	48
1. Interpretasi Hasil Data CFA.....	50
2. Interpretasi Hasil Data Regresi Linier Berganda	58
3. Hasil Uji T.....	59
4. Hasil Uji F.....	60
5. Hasil Uji D	60
6. Hasil Uji Normalitas	61
7. Hasil Uji Linieritas.....	61
8. Hasil Uji Multikolinieritas	63
9. Hasil Uji Autokorelasi	64
C. Pembahasan.....	65
1. Hasil Uji Faktor-Faktor PAD Menggunakan Metode CFA.....	68
2. Hasil Uji Faktor-Faktor PAD Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda Setelah CFA	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB, Jumlah Penduduk, DAU, DAK, DBH Pajak, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Subsidi dan PAD (Dalam Rupiah) Kota Medan Tahun 2010-2017.....	6
Tabel 1.2 Originalitas Penelitian	17
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	35
Tabel 3.1 Definisi Operasional	40
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	41
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Medan	46
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.3 Kmo And Bartletts Test	50
Tabel 4.4 Comunalities	51
Tabel 4.5 Total Variance Explained.....	52
Tabel 4.6 Component Matrix	54
Tabel 4.7 Rotated Component Matrix.....	55
Tabel 4.8 Component Transformation Matrix	55
Tabel 4.9 Data Regresi Linier Berganda.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Cfa	27
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Regresi Linier Berganda.....	38
Gambar 4.1 Scree Plot.....	53
Gambar 4.2 Kerangka Konseptual Regresi Linier Berganda.....	57
Gambar 4.3 Hasil Regresi Linier Berganda	58
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas.....	61
Gambar 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas	63
Gambar 4.6 Hasil Persamaan Satu	63
Gambar 4.7 Hasil Persamaan Kedua.....	64
Gambar 4.8 Hasil Persamaan Uji Autokorelasi	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari adanya Pendapatan Asli Daerah ialah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mendanai terlaksananya otonomi daerah yang sesuai dengan potensi daerah itu sendiri sebagai wujud dari adanya desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah". (Sihotang, F.Santoso, & Iskandar, 2015). PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Maka dari itu salah satu pendapatan asli daerah adalah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah, berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur rumah tangga sendiri. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom atau berotonomi yaitu terletak pada kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengolah dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Berdasarkan undang-undang uraian diatas jelas diketahui salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi yang terdiri berasalkan dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Motor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Dan Pajak Rokok Pajak Kabupaten dan Kota yang terdiri dari: Pajak

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan penjelasan pajak daerah diatas yang menjadi pembahasan adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung kesinambungan kota medan. Pajak restoran juga sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan pajak restoran tersebut, pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan harus mengawasi proses pelaksanaan pajak restoran ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Perda Kota Medan No. 12 Tahun 2003, Pajak restoran yang merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran mencakup fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan pajak restoran di kota medan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak restoran pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan, dimana pihak badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan harus melakukan kegiatan yang lebih intensif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam pelaksanaan pajak restoran tersebut tentunya masih banyak ditemukan

permasalahan dan kendala-kendala terutama bagi pemerintah daerah. Salah satu kendalanya adalah kurang tertibnya administrasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan pajak restoran ini harus lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi, tentunya akan dapat meningkatkan penerimaan daerah, yang nantinya dapat digunakan sebagai pembangunan daerah. Sejak dahulu pemerintah daerah mempunyai harapan yang besar untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan daerah sendiri. Otonomi daerah dan desentralisasi bisa menjadi jawaban atas harapan pemerintah daerah ini. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, bahwa pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien. Untuk meningkatkan efisiensi pemerintah daerah perlu melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan yang selama ini dijalankan.

Menurut Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pada hakikatnya kebijakan desentralisasi fiskal

mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu mencapai tujuan otonomi daerah itu sendiri yaitu kemandirian daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat besar. Pemerintah daerah di haruskan untuk membiayai APBD dari Pendapatan Asli Daerah, karena PAD merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu hasil pajak daerah yang memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah adalah pajak bumi dan bangunan perkotaan maupun perdesaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau disingkat menjadi PBB-P2 adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, atau pertambangan (Pasal 77 UU No. 28 Tahun 2009). Pada tanggal 18 Agustus 2009, pemerintah telah mengesahkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang secara resmi telah berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Kemunculan UU PDRD tersebut akan menggantikan UU yang lama yaitu UU No. 18 Tahun 1997 dan Undang-undang 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang pajak daerah dan retribusi daerah ini, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan

perkotaan (PBB P2) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.

Tabel 1.1 PDRB, Jumlah Penduduk, DAU, DAK, DBH Pajak, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Subsidi dan PAD (Dalam Juta Rupiah) Kota Medan Tahun 2010-2017

Tahun	PDRB (Rp)	Jumlah Penduduk (orang)	DAU (Rp)	DAK (Rp)	DBH Pajak (Rp)
2010	90.615	2.097.610	878.331.852	67.201.000	306.008.976
2011	97.675	2.117.224	1.066.691	81.594.500	264.364.427
2012	105.161	2.122.804	1.153.789	66.298.270	178.543.058
2013	110.795	2.135.516	1.270.244	74.276.510	193.008.107
2014	117.525	2.191.140	1.393.504	74.109.590	221.252.388
2015	124.269	2.210.624	1.232.071	0	194.712.827
2016	132.062	2.229.408	1.611.940	691.447.245	249.664.554
2017	139.730	2.247.425	1.611.940	365.181.871	257.310.464

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Subsidi (Rp)	PAD (Rp)
2010	1.348.856	585.145.948	1.000.000	548.479.109
2011	1.658.817	750.595.742	0	1.110.469.593
2012	1.895.352	953.982.988	0	1.594.454.835
2013	2.219.729	896.976.406	0	1.578.247.819
2014	2.401.064	1.008.867	0	1.678.116.623
2015	2.679.606	1.308.739	0	1.794.704.774
2016	2.959.163	1.394.929	0	1.884.851.580
2017	2.498.899	1.552.599	0	2.031.995.548

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan PDRB dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, peningkatan jumlah penduduk di Kota Medan dari tahun 2010 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan, kemudian DAU juga mengalami peningkatan setiap tahunnya hanya DAK yang tidak stabil dalam perkembangan dana alokasi khususnya, selalu mengalami peningkatan dan penurunan, sedangkan DBH Pajak, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Subsidi perkembangan dananya tidak cukup baik kadang mengalami penurunan dan juga mengalami peningkatan dan perkembangan PAD Kota Medan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

PDRB adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah. Menurut Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Adam Smith (dikutip oleh Santosa dan Rahayu, 2005) menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan bahwa, penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan asli daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Gde Bhaskara dan A.A Bagus, 2014).

Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi

terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah.

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (permendagri nomor 25 tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan

umum. Namun faktanya pemerintah daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja rutin daripada belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Kabupaten/Kota Medan Tahun 2010-2017. Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan dari daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Nuarisa, 2013).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 32/2004 dan UU 23/2014 melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft atau rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

yang berkembang di daerah. Undang-Undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD (Ardhani, 2011).

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management*. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas publik pelayanan publik pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya yang selama ini belanja daerah tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Pemerintah Pusat memberi pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik

dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah, peneliti tertarik ingin meneliti lebih jauh mengenai “**Analisis Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- 1) Terjadinya penurunan PAD pada tahun 2013.
- 2) DAU mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2015.
- 3) Terjadinya penurunan DAK pada tahun 2012 dan 2015.
- 4) DBH Pajak mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2015, tetapi untuk jumlah nilai PDRB selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya.
- 5) Meningkatnya jumlah Belanja Pegawai disetiap tahunnya. Akan tetapi terjadinya penurunan belanja barang di tahun 2013.
- 6) Belanja subsidi hanya terjadi pada tahun 2010, sedangkan untuk di tahun selanjutnya tidak terjadinya adanya belanja subsidi.

2. Batasan Masalah

Untuk mencegah mengembangnya permasalahan maka penulis membatasi masalah untuk lebih terperinci dan jelas sehingga pemecahannya terarah dan berhasil. Penulis membatasi menganalisis faktor-faktor pendapatan asli daerah di Kota Medan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Faktor manakah (PDRB, Jumlah Penduduk, DAU, DAK, DBH Pajak, Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Belanja Subsidi) yang relevan dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di kota Medan?
2. Apakah faktor-faktor (PDRB, Jumlah Penduduk, DAU, DAK, DBH Pajak, Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Belanja Subsidi) yang relevan tersebut berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Medan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian diatas adalah :

1. Untuk mengetahui faktor manakah (PDRB, Jumlah Penduduk, DAU, DAK, DBH Pajak, Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Belanja Subsidi) yang relevan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

2. Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor relevan tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mengenai belanja daerah dalam suatu daerah adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan serta dapat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bagi pembaca penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, DAU, DAK, Dana Bagi Hasil, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Subsidi di Kota Medan dan juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.
3. Bagi pemerintah penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya merumuskan kebijakan pembangunan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini di dapat dari penelitian Riandani Rezki Prana (2016). Universitas Sumatera Utara, dalam penelitian ini mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi”. Penelitian ini menggunakan data Sekunder time series. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari internet, dengan menggunakan model analisis regresi dengan metode simultan. Berdasarkan perbedaan lokasi penelitian, tahun penelitian, data penelitian dan metode penelitian yang digunakan menjadi perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dibuat pasti dengan baik.

Tabel 1.2 Originalitas Penelitian

No	Keterangan	Peneliti Terdahulu	Peneliti Sekarang
1	Lokasi Penelitian	Kota Tebing Tinggi	Kota Medan
2	Tahun Penelitian	2016	2019
3	Data Penelitian	2001–2012	2010–2017
4	Metode Penelitian	Regresi Simultan	CFA dan Regresi Linier Berganda

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi maupun dari sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah wilayah tersebut. Kemudian hasilnya akan diterima oleh badan keuangan pemerintah daerah agar disimpan dan dipergunakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang ditetapkan. Tujuan dari pendapatan asli daerah adalah untuk mendanai otonomi daerah dalam mengurus wilayah masing-masing, guna untuk kepentingan masyarakat wilayah sekitarnya.

Menurut Fadillah (2020), “ peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhan sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri”.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan tujuan untuk memberikan kewenangan terhadap daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dan desentralisasi”. Menurut Mayza, dkk (2015), “PAD merupakan pendapatan yang diterima daerah yang dapat bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Semua

pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut diperoleh dari hasil ekonomi asli daerah”. Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak daerah yaitu pendapatan daerah yang diterima dari hasil pajak.
- b. Retribusi daerah adalah penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang diterima dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut ini :

- 1). Bagian laba perusahaan milik daerah
- 2). Bagian laba lembaga keuangan bank
- 3). Bagian laba lembaga keuangan non bank
- 4). Bagian laba atas pernyataan modal dan investasi

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi kepada daerah tanpa imbalan apapun langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk berbagai keperluan daerah seperti membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah yaitu sumber pendapatan yang dominan yang akan diusahakan daerah untuk menambah pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, “menyatakan retribusi daerah memiliki

ciri-ciri yang utama yaitu Retribusi yang dipungut oleh daerah ini menjelaskan bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar pajak langsung sebagai salah satu pendapatan daerah, pungutan daerah dalam retribusi menunjukkan secara langsung bahwa pemerintah dapat menunjukkan untuk kemajuan pendapatan dalam retribusi daerah dan retribusi tersebut di bebaskan kepada siapa saja yang menggunakan dan merasakan jasa yang disediakan oleh daerah”.

Perusahaan daerah dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu Pertama Perusahaan asli daerah yaitu perusahaan daerah yang didirikan oleh daerah itu sendiri. Kedua perusahaan daerah yang berasal dari pemerintah atasannya. Yang dimaksud dalam perusahaan daerah tersebut adalah pada dasarnya dibentuk dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan, dengan mengutamakan pembangunan daerah dengan memberikan jasa kepada masyarakat dan memberikan dukungan bagi ekonomi daerah. (Jaya dan Widanta, 2014).

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto yaitu sejumlah nilai tambah yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menjelaskan sejumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dapat dihitung dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan hasil dari keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang kemudian dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Kemampuan sumberdaya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah dapat

diketahui melalui PDRB atas harga berlaku. Selain itu, pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga dapat diketahui melalui PDRB atas harga dasar konstan. PDRB dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB. (Bank Indonesia, 2016).

Menurut Fadillah (2020), “pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah dan daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai *Product Domestic Regional Bruto* setiap tahunnya PDRB diukur atas dasar harga konstan suatu daerah”.

Menurut M.P Todaro, dalam buku ekonomi pembangunan, “Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap, dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar”. Pelaksanaan otonomi daerah tercapai dari pertumbuhan ekonomi karena adanya keleluasaan oleh pemda agar mengurus dan mengembangkan maupun menggali potensi yang dimiliki masing-masing wilayah daerah itu sendiri.

Menurut Simon Kuznet, dalam buku pembangunan ekonomi di dunia ke tiga “Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan”.

Menurut Prawira (2018:3), “Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomimasyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat, sementara perekonomian yang menurun atau pertumbuhan ekonomi dengan nilai negative berarti turunnya kesejahteraan ekonomi. Disisi lain tingkat pertumbuhan juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian”.

Berkaitan dengan hal tersebut maka PDRB dapat diukur melalui tiga pendekatan, yaitu

a. Pendekatan Produksi

Dalam perhitungan PDRB keseluruhan dari nilai produk barang-barang dan jasa akhir dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah dalam jangka satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan dalam 17 sektor disuatu daerah.

b. Pendekatan Pendapatan

Perhitungan PDRB untuk jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Selain variabel-variabel tersebut, penyusutan pajak tidak langsung dan subsidi merupakan bagian yang harus diperhitungkan PDRB.

c. Pendekatan Pengeluaran

Perhitungan dalam pendekatan pengeluaran untuk menghitung PDRB yang akan menghasilkan nilai jumlah pengeluaran dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga sosial swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor. (Jaya dan Widanta, 2014).

3. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu (Mantra, 2009). Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan dampak adanya batas, bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial, mengenai sumber daya alam serta kemampuan biosfer menyerap berbagai pengaruh dari kreativitas manusia. Teknologi dan organisasi dapat dikelola dan ditingkatkan guna memberi jalan bagi era baru pembangunan ekonomi.

Menurut Silastri (2017), “Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam suatu Negara. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk”.

Berdasarkan penelitiannya, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu :

a. Fertilitas (Kelahiran)

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup

b. Mortalitas (Kematian)

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian, tidak saja bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Data kematian sangat diperlukan untuk proyeksi penduduk guna perancangan pembangunan. Misalnya, perencanaan fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan dan jasa-jasa lainnya untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan evaluasi terhadap program-program kebijakan penduduk.

c. Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Migrasi merupakan salah satu faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Peninjauan migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat

terjadinya kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor- faktor pendorong dan penarik bagi orang-orang untuk melakukan migrasi, seperti komunikasi dan transportasi yang semakin lancar. Pada umumnya orang yang datang dan pergi antar negara boleh dikatakan berimbang saja jumlahnya. Peraturan-peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh banyak negara umumnya sangat sulit dan ketat bagi seseorang untuk bisa menjadi warga negara atau menetap secara permanen di suatu negara lain.

Dengan demikian strategi pembangunan berkelanjutan bermaksud mengembangkan keselarasan baik antara umat manusia dengan alam. Keselarasan tersebut tentunya tidak bersifat tetap, melainkan merupakan suatu proses yang dinamis. Proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan diselenggarakan secara konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Oleh karena itulah dalam pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi penduduk serta sumber daya alam dan lingkungan yang ada di suatu wilayah tertentu. Beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, antara lain adalah (Tjiptoherijanto, 2002) :

- a. Kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Dalam GBHN dengan jelas dikemukakan bahwa penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi

penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.

- b. Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.
- c. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, sering kali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa krisis ekonomi dewasa ini akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang selama 25 tahun ke depan atau satu generasi. Dengan demikian, dapat dibayangkan bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia pada generasi mendatang 25 tahun setelah tahun 1997. Demikian pula hasil program keluarga berencana yang dikembangkan 30 tahun yang lalu (1968),

baru dapat dinikmati dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan demikian tidak dindahkannya dimensi kependudukan dalam rangka pembangunan nasional sama artinya dengan menyengsarakan generasi berikutnya.

4. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Awaniz (2011:19) Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Sedangkan menurut Halim (2016 : 127) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat block grant, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Menurut Azhari (2019), “berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan transfer yang cukup signifikan di dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara leluasa dapat digunakan untuk member pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat”.

Menurut Fadillah (2020), “ Dana alokasi umum merupakan sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonomi, baik itu

provinsi, kabupaten maupun kota yang di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana alokasi umum ialah salah satu komponen belanja untuk APBN dan menjadi salah satu komponen sebagai pendapatan pada APBD.

Dana alokasi umum dialokasikan untuk provinsi, kabupaten, dan kota di tetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN".Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

a. Tujuan Pembentukan Dana Alokasi Umum

Menurut Indraningrum (2011:23) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (*block grant*) kepada pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut :

- 1). Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*)
- 2). Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*)
- 3). Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah
- 4). Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa dana alokasi umum kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.

5. Dana Alokasi Khusus

Menurut Halim (2014:16) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengertian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 yaitu dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Menurut Bahar (2009:156) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang masih belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Yang dimaksud daerah tertentu adalah alokasi DAK. Dengan demikian tidak semua daerah mendapatkannya. Pemerintah menetapkan tiga kriteria bagi suatu daerah agar mendapatkan DAK, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

6. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 20). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian dana bagi hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Menurut Bird dan Vaillancourt (2000:42), banyak negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai kepada pemerintah daerah. Sidik (2004:95) mengatakan bahwa, untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:

44) menjelaskan bahwa, Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat dan penerimaan dari sumber daya alam. Bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu.

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh Pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berasal dari yang pertama kehutanan, kedua pertambangan umum, ketigaperikanan, keempat pertambangan gas bumi dan kelima pertambangan panas bumi. Dana bagi hasil (*revenue sharing*) belum menyentuh seluruh sumber-sumber daya potensial yang diperoleh dari daerah Kabupaten/Kota baik berupa pajak, antara lain seperti PPN, PPh Pasal 25/29 Badan dan jenis pajak lainnya, maupun dari sumber daya alam yang secara umum masih tetap dikuasai oleh pemerintah pusat sebagai penerimaan dalam negeri pada APBN. Dalam hal yang sama, Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:44) menegaskan, salah satu jenis pajak yang penting adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang sampai saat ini secara formal dimiliki sepenuhnya oleh pusat. Dalam jangka panjang yang diharapkan ada pembagian jenis PPN yang dimiliki pusat dan yang dimiliki daerah. Pembagian wewenang ini tentunya mempertimbangkan jenis komoditi atau jasa yang dipungut PPN-nya, pada tingkat pemerintahan mana pengelolaan ini akan optimal dan bagaimana mekanisme bagi hasilnya jika ada

7. Belanja Daerah

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pasal 20 Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadikan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (PP No.58 Tahun 2005). Belanja daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 19 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 24 Tentang Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 24 tentang perubahan kedua, klasifikasi belanja daerah menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung

adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga uang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produk atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

d. Bantuan sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang termasuk belanja langsung adalah :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja jenis ini antara lain untuk menampung honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aktiva tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

c. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan untuk dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tinjauan penelitian sebelumnya:

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisa	Hasil
1.	Hustianto Sudarwadi (2015) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah ((Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsipapua Barat)	Belanja Modal, PAD, DAU Dan DAK	Menggunakan Model Fixed Effect Model (FEM)	Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
2.	Fathulfajar Muktiawan (2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Daerah Di Kota Pulau Jawa.	PAD, DAU, Luas Wilayah, Alokasi Belanja Daerah	Menggunakan Metode <i>Purposive Sampling</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah, DAU dan luas wilayah berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah.
3.	Dwiranda (2014) Pengaruh PAD Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Dikabupaten/Kota Di Provinsi Bali	Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi	Menggunakan Analisis <i>Ordinary Least Squared</i> (OLS)	Menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi PAD pada Belanja Modal tetapi dengan intensitas dan arah berlawanan.
4.	Riandani Rezki Prana (2016) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tebing Tinggi	Pad, Pajak, Retribusi, Konsumsi, Pdrb, Jumlah Penduduk	Menggunakan Metode Regresi Simultan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, konsumsi berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 10$ persen, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 10$ persen, dan variabel jumlah penduduk (POP) berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 10$ persen dan variabel Retribusi tahun sebelumnya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tebing Tinggi. Model TAX menunjukkan bahwa variabel konsumsi berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 10$ persen dan variabel pajak daerah tahun sebelumnya (TAX1) berpengaruh positif tapi tidak signifikan pada $\alpha = 10$ persen. Model RET menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan dan tidak signifikan pada $\alpha = 10$ persen,

				variabel jumlah penduduk (POP) tidak berpengaruh signifikan pada $\alpha = 10$ persen dan variabel retribusi daerah tahun sebelumnya (RET1) berpengaruh positif dan tidak signifikan pada $\alpha = 10$ persen. Sedangkan pada model OTHS menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan pada $\alpha = 10$ persen, variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 10$ persen.
5.	Sandi Hasudungan Pasaribu (2016) Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara	PAD, DAU, Anggaran Belanja	Menggunakan Analisis Deskriptif Kuantitatif	Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan (X1), dan dana alokasi umum (X2) berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk hasil penelitian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel penerimaan daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Sulawesi Utara.
6.	Dewi Dansuyanto (2013) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah	Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK	Menggunakan Model Fixed Effect Model (FEM)	Hasil regresi menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. PAD dan DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan DAK secara tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap Belanja Modal.
7.	Batik (2013) Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap PAD Di Kab Lombok Barat	PAD, PDRB, Jumlah Penduduk, Investasi, Inflasi Dan Penerimaan Pembangunan	Menggunakan Analisis <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	Hasil analisis menunjukkan bahwa Variabel investasi, PDRB dan penerimaan pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan jumlah penduduk dan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

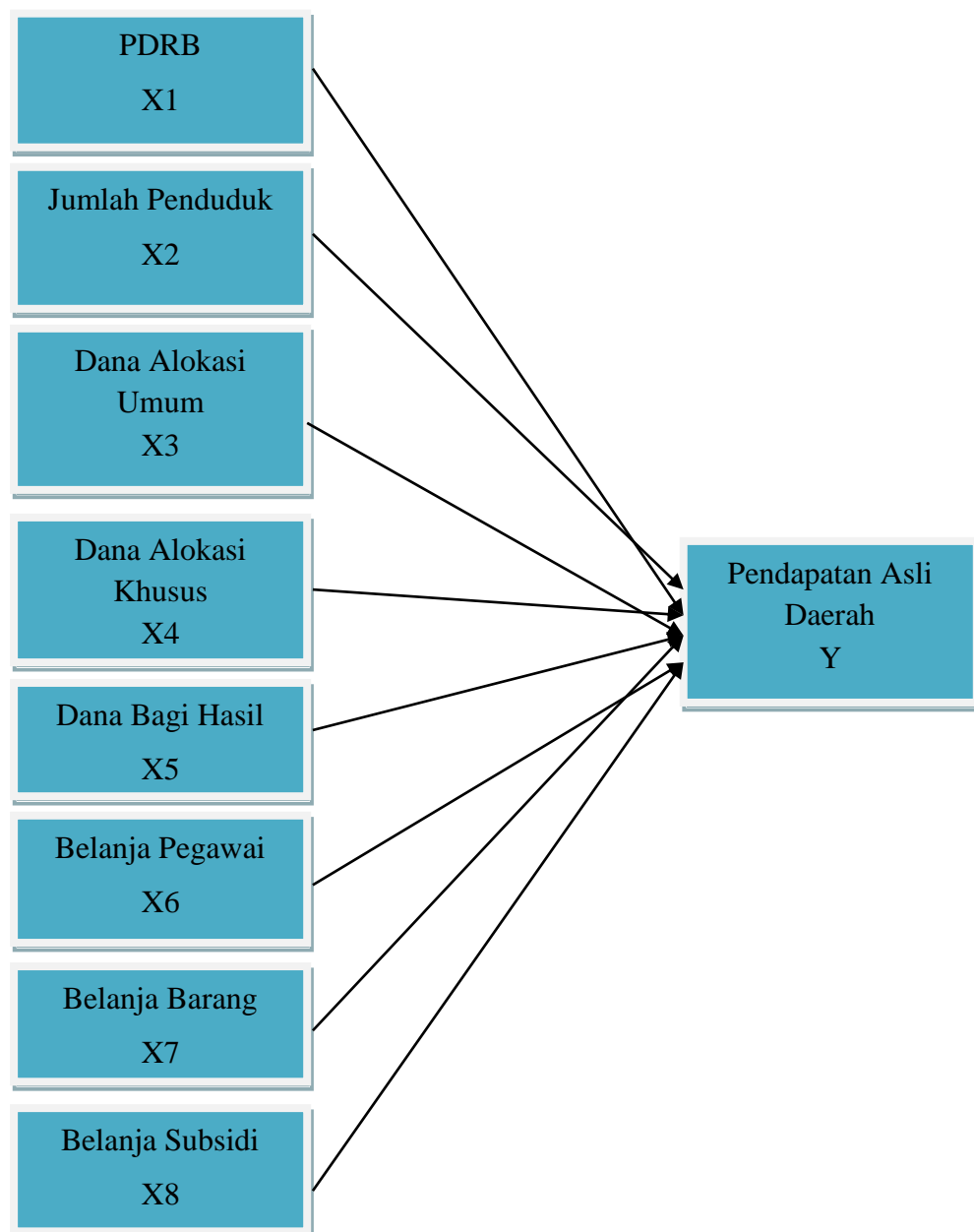
8.	Kasyati(2015) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, Dan Kemandirian Fiskal Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, Kemandirian Fiskal, Belanja Modal.	Menggunakan Analisis <i>Purposive Sampling</i>	Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Fiskal tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.
9.	Sari (2013) Analisis Variabel Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali	PDRB, Jumlah Kunjungan Wisatawan Penduduk, Investasi, DAU DAK, PAD	Menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda Dimana PAD Dijawab Dengan Model ARIMA	Hasil ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, tingkat investasi, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD Provinsi Bali Periode 1991-2009
10.	Gitaningtyas Dan Kurrohman (2014) Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi PAD Pada Kab/Kota Di Provinsi Jawa Timur	PDRB, PAD, Investasi, Jumlah Penduduk	Menggunakan Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini bahwa Variabel PDRB, jumlah penduduk, dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah.

Sumber :Disusun Penulis, 2021

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan review penelitian terdahulu sebagaimana telah dikemukakan maka hubungan antar variabel dapat digambarkan melalui model kerangka konsep penelitian pada gambar 2.1 berikut ini :

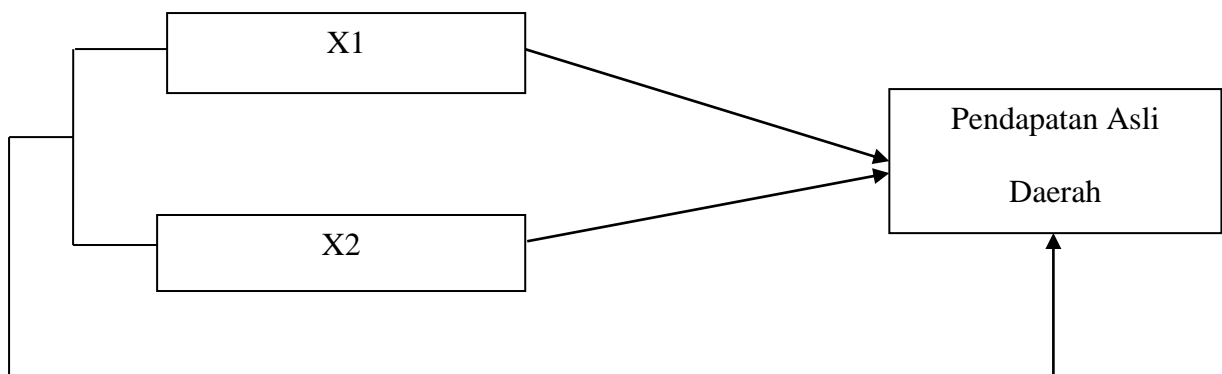
a. Kerangka Konseptual CFA



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual CFA

Dalam gambar di atas menunjukkan variabel independen yaitu PDRB, Jumlah penduduk, DAU, DAK, Dana bagi hasil, Belanja pegawai, Belanja Barang dan Belanja Subsidi serta variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dalam penelitian ini. Variabel independen ini diprediksi akan mempengaruhi variabel dependen dalam arti peningkatan dan penurunan yaitu PDRB, Jumlah penduduk, DAU, DAK, Dana bagi hasil, Belanja pegawai, Belanja Barang dan Belanja Subsidi akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah .

b. Kerangka Konseptual setelah CFA (Regresi Linier Berganda)



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Regresi Linier Berganda

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian dimana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan perumusan diatas, maka penulis membuat hipotesisnya yaitu :

1. Semua faktor-faktor (PDRB, Jumlah Penduduk, DAU, DAK, DBH Pajak, Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Belanja Subsidi) yang relevan dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di kota Medan.
2. Faktor-faktor yang relevan tersebut berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Dan untuk variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB, Jumlah penduduk, DAU, DAK, Dana bagi hasil, Belanja pegawai, Belanja Barang dan Belanja Subsidi.

B. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	PDRB (X1)	Jumlah unit tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dan dihitung secara berkala berdasarkan harga konstan dalam persen	kenaikan output per kapita dan PDRB berdasarkan harga berlaku dan berdasarkan harga konstan
2	Jumlah Penduduk (X2)	Jumlah semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota di Kota Medan selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap	Kelahiran (Fertilitas), Kematian (Mortalitas) dan Migrasi
3	Dana Alokasi Umum (X3)	Dana transfer dari APBN ke pemerintah provinsi untuk melaksanakan desentralisasi	Realisasi DAU per total pendapatan
4	Dana Alokasi Khusus (X4)	Dana transfer dari APBN ke pemerintah provinsi untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi tujuan nasional dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi	Realisasi DAU per total pendapatan
5	Dana Bagi Hasil (X5)	Dana transfer dari APBN ke pemerintah provinsi yang merupakan dana bagi hasil kepada pemerintah provinsi	Realisasi DBH per total pendapatan
6	Belanja Pegawai (X6)	Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Realisasi belanja pegawai per total pendapatan
7	Belanja Barang (X7)	Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan untuk dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.	Realisasi belanja barang per total pendapatan
8	Belanja Subsidi (X8)	Belanja subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.	Realisasi belanja subsidi per total pendapatan
9	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Jumlah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pajak daerah, retribusi daerah

Sumber: Disusun Penulis, 2021

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Medan. Waktu penelitian ini di mulai dari bulan November 2019 sampai dengan tahun 2020. Untuk lebih jelasnya seperti dirincikan pada tabel berikut. :

Tabel. 3.2 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun																				
		Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agust 2021													
1	Riset awal/pengajuan judul	■	■																			
2	Penyusunan proposal		■	■	■	■																
3	Seminar proposal				■	■																
4	Perbaikan / acc proposal					■	■	■														
5	Pengolahan data							■	■													
6	Penyusunan skripsi								■	■	■											
7	Bimbingan skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Meja hijau																					■

Sumber : Disusun Penulis, 2021

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan runtun waktu (*time series*). Data sekunder adalah yang diperoleh para peneliti melalui banyak mencari sumber yang sebelumnya sudah ada atau data yang langsung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data BPS (Badan Pusat Statistik) mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2017 (8tahun).

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan suatu

cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terkait dengan penelitian. Metode ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi laporan, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan data-data yang relevan dengan penelitian tersebut (Ridwan, 2008). Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari arsip perpustakaan Badan Pusat Statistik Kota Medan.

F. Metode Analisa Data

Metode Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Metode CFA. Untuk menjawab hipotesis pertama, digunakan Analisis faktor yaitu menemukan suatu cara meringkas informasi yang ada dalam variabel asli (awal) menjadi satu set dimensi baru atau variate (faktor) dengan rumus :

$$X_i = B_{i1} F_1 + B_{i2} F_2 + B_{i3} F_3 + \dots + V_{i\mu}$$

Sumber : J. Supranto (2004)

Dimana:

X_i = Variabel ke-i yang dibakukan

B_{ij} = Koefisien regresi parsial yang untuk variabel i pada *common factor* ke-j

F_j = *Common factor* ke-i

V_i = Koefisien regresi yang dibakukan untuk variabel ke-i pada faktor yang unik ke-i

μ_i = Faktor unik variabel ke-i

Kriteria pengujian : faktor dinyatakan merupakan faktor relevan apabila memiliki koefisien komponen matrix $\geq 0,5$.

Khusus untuk Analisis Faktor, sejumlah asumsi berikut harus dipenuhi: (Santoso, 2006) :

1. Korelasi antarvariabel Independen. Besar korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat, misalnya di atas 0,5.
2. Korelasi Parsial. Besar korelasi parsial, korelasi antar dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain, justru harus kecil. Pada SPSS deteksi terhadap korelasi parsial diberikan lewat pilihan Anti-Image Correlation.
3. Pengujian seluruh matriks korelasi (korelasi antar variabel), yang diukur dengan besaran *Bartlett Test of Sphericity* atau *Measure Sampling Adequacy (MSA)*. Pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan di antara paling sedikit beberapa variabel.
4. Pada beberapa kasus, asumsi Normalitas dari variabel-variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya dipenuhi.

Analisis regresi dapat dikatakan jantung dari ekonometrika. Dengan regresi, kita berupaya mengungkapkan hubungan antar variabel dengan memasukkan unsur kausalitas. Dengan kata lain kita ingin mengetahui jika suatu variabel berubah (misalnya x: tingkat pendidikan) maka, apa yang terjadi dengan variabel lainnya (misalnya y: tingkat gaji/upah). Analisis regresi dalam pengembangannya dapat bersifat sangat kompleks, yang disebabkan karakteristik data, pelanggaran asumsi statistikk, nonstationarity, dsb. Analisis regresi yang paling sederhana adalah regresi linier sederhana, model ini hanya melibatkan 2 variabel, yakni 1 variabel bebas dan 1 variabel terkait.

Dalam banyak kasus, penggunaan regresi dua variabel untuk memodelkan hubungan ekonomi dapat dipandang terlalu sederhana (*oversimplification*) terhadap realitas. Hubungan yang ada mungkin harus dijelaskan oleh beberapa

variabel atau bahkan suatu hal akan oleh beberapa variabel atau bahkan suatu model interaksi di antara variabel. Dalam bagian ini dilakukan pengembangan terhadap model regresi bivariat dengan memasukan beberapa variabel yang relevan. Suatu model regresi linier berganda dengan dapat dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Dimana:

Y = variabel endogen

a = konstanta

b = koefisien regresi

x = variabel eksogen

e = error term

Metode Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Metode Analisis Regresi

Linier Berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = Jumlah penduduk

X2 = DBH Pajak

e = Error Term

Regresi Linier Berganda didukung oleh Test Goodness Of Fit yang terdiri dari :

1). Uji T (Uji Hipotesis Parsial)

2). Uji-F (Uji Hipotesis Simultan)

3). Uji-D (Uji Determinasi)

Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini harus memenuhi syarat asumsi klasik sebagai berikut :

a. Uji Normalitas Data

b. Uji Multikolinieritas

c. Uji Autokorelasi

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Luas Wilayah Kota Medan

Setiap wilayah yang berada dikota medan memiliki luas wilayah masing-masing. Dimana terdapat 21 kecamatan yang terdiri sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Medan

NO	KECAMATAN	LUAS
1	Medan Tuntungan	20,68
2	Medan Selayang	12,81
3	Medan Johor	14,58
4	Medan Amplas	11,19
5	Medan Denai	9,05
6	Medan Tembung	7,99
7	Medan Kota	5,27
8	Medan Area	5,52
9	Medan Baru	5,84
10	Medan Polonia	9,01
11	Medan Maimun	2,98
12	Medan Sunggal	15,44
13	Medan Helvetia	13,16
14	Medan Barat	6,82
15	Medan Petisah	5,33
16	Medan Timur	7,76
17	Medan Perjuangan	4,09
18	Medan Deli	20,84
19	Medan Labuhan	36,67
20	Medan Marelan	23,82
21	Medan Belawan	26,25
	TOTAL	265,1

Kota medan mempunyai letak wilayah yang sangat strategis, dimana wilayah kota medan dilalui sungai deli dan sungai Babura tersebut. Jalur dari kedua sungai tersebut merupakan tempat lintas perdagangan yang cukup ramai pula, ditambah dengan keberadaan pelabuhan belawan di jalur selat malaka yang

sudah termasuk modern sebagai pintu gerbang atau masuknya perdagangan barang, wisatawan, jasa, perdagangan domestik luar maupun dalam negeri seperti ekspor impor yang menjadikan medan adalah pintu gerbang Indonesia di bagian barat.

Kota medan memiliki area luas wilayah 26.510 hektar yang dimana dibagi menjadi 21 kecamatan dan memiliki 151 kelurahan. Kota medan memiliki beberapa tugas fungsi yaitu sebagai pusat industri, pusat akomodasi pariwisata, pusat jasa pelayanan keuangan, pusat perdagangan regional maupun internasional dan sebagai pusat administrasi pemerintahan. Kota medan juga memiliki bandara internasional, yaitu polonia yang berada di wilayah yang masih dibidang masuk dalam kota pelabuhan belawan dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam. Dengan menggunakan jalan toll tanpa adanya hambatan. Namun, sekarang bandara internasional di kota medan sudah pindah lokasi dan diganti namanya dengan sebutan bandara kuala namu. Jarak tempuhnya tidak jauh berbeda dengan jarak tempuh ke bandara polonia dulu. Demikian pula kawasan industrinya tidak jauh dari kota medan yaitu di belawan maupun di deli serdang.

Wilayah kota medan secara geografis berada diantara 3°30' – 3°43' LU dan 98°35' – 98°44' BT. Kota medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya akan sumber alam seperti labuhan batu, simalungun, tapanuli utara, tapanuli selatan, karo, binjai, mandailing natal, deli serdang dan lain-lain sebagainya. Kondisi kota medan kalau dilihat secara ekonominya mampu bekerja sama dan memiliki kemitraan yang sejajar dan saling menguntungkan satu sama lainnya, dan mampu memperkuat menjaga silahturami dengan daerah-daerah lainnya yang berada di sekitarnya.

2. Perekonomian Di Kota Medan

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997, yang mempunyai dampak besar pada setiap wilayah yang ada di Indonesia dan khususnya pada kota Medan yang dapat dilihat dan dirasakan pengaruh buruknya terhadap masyarakat disekitarnya. Tentu, dimana pada tahun 1998 laju pertumbuhan ekonomi kota Medan mengalami penurunan hingga mencapai 18,11%. Akan tetapi pada tahun 1999 pemerintah kota Medan langsung mengambil tindakan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh hingga mencapai keberhasilan. Sehingga kondisi perekonomian pada kota Medan mengalami pertumbuhan sebesar 3,44%.

Perekonomian kota Medan didominasi oleh empat struktur lapangan usaha yaitu perdagangan, industri pengolahan (14,28%), hotel dan *restaurant* (28,10%), keuangan, persewaan maupun jasa, serta pengangkutan maupun telekomunikasi (19,38%). Dari keempat sektor tersebut dapat memberikan kontribusi sekitar 76,18% terhadap perekonomian daerah khususnya kota Medan.

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini ada Sembilan variabel yang dimana terdiri dari delapan variabel bebas yaitu (PDRB, Jumlah Penduduk, DAU, DAK, DBH Pajak, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Subsidi), sedangkan untuk variabel terikatnya hanya satu yaitu (PAD). Penelitian ini akan diuji dengan menggunakan metode CFA dengan aplikasi pengolahan data SPSS versi 16.00. dari delapan variabel bebas tersebut akan diuji datanya untuk melihat variabel mana sajakah yang akan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu PAD. Apakah

PAD memiliki 4 variabel yang berpengaruh signifikan atau bahkan bisa lebih dan bisa kurang dari empat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap PAD.

1. Deskriptif Penelitian

dalam statistik deskriptif penelitian, ada delapan variabel bebas (X) yang terdiri dari (PDRB, Jumlah Penduduk, DAU, DAK, DBH Pajak, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Subsidi), sedangkan variabel terikatnya (Y) yaitu PAD. Adapun tabel yang disajikan untuk menjelaskan dari hasil penelitian dalam bentuk statistik deskriptif pada tabel 4.2 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation
PDRB	8	9.9009	36943.05976
JUMLAHPENDUDUK	8	2.1690	57389.48543
DAU	8	1.1096	3.10066
DAK	8	1.7751	2.34809
DBHPAJAK	8	2.3311	4.36733
BELANJAPEGAWAI	8	2.2077	5.40657
BELANJABARANG	8	3.9900	4.38645
BELANJASUBSIDI	8	1.2500	3.53553
PAD	8	1.5277	4.80439

Sumber: hasil pengolahan (spss versi 16.0:2021)

Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai pada Mean PDRB memiliki nilai rata-rata sebesar 9.9009. sedangkan nilai Std. Deviation sebesar 36943.05976. dengan banyaknya data 8 tahun. Untuk jumlah penduduk memiliki nilai rata-rata sebesar 2.1690. Std. Deviation sebesar 57389.48543. dan banyaknya data sebesar 8 tahun. DAU memiliki nilai rata-rata sebesar 1.1096. sedangkan nilai Std. Deviationnya sebesar 3.10066. Dan banyaknya N sebesar 8 tahun. DAK memiliki nilai Mean sebesar

1.7751. sedangkan Std. Daviation sebesar 2.34809. Dan banyaknya N pada data sebesar 8 tahun. DBH Pajak memiliki nilai Mean sebesar 2.3311. Std. Daviation sebesar 4.36733. Dan banyaknya N pada data sebesar 8 tahun. Selanjutnya Belanja pegawai memiliki nilai Mean sebesar 2.2077. Std. Daviation sebesar 5.40657. Dan banyaknya N pada data sebesar 8 tahun. Nilai Mean pada Belanja Barang sebesar 3.9900. Std. Daviation sebesar 4.38645. Dan banyaknya N pada data sebesar 8 tahun. Belanja Subsidi nilai Meannya sebesar 1.2500. Std. Daviation sebesar 3.53553. Dan banyaknya N pada data sebesar 8 tahun. Dan yang terakhir nilai Mean pada PAD sebesar 1.5277. Sedangkan Std. Daviation sebesar 4.80439. Dan banyaknya N pada data sebesar 8 tahun.

2. Interpretasi Hasil Data CFA

Untuk menganalisis data hasil penelitian maka peneliti melakukan dan menerapkan metode analisis kuantitatif yaitu dengan mengelola data kemudian diinterpretasikan, sehingga akan diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya dilakukan analisis faktor yang bertujuan untuk menemukan suatu cara meringkas informasi yang ada dalam variabel asli (awal) menjadi satu set dimensi baru atau variabel (faktor). Pengolahan data menggunakan program, SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3 KMO And Bartlett's Test
KMO And Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling Adequacy	.594
Bartlett's Test Of Approx. Chi-Square	165.077
Df	24
Sig.	.000

Sumber: hasil pengolahan (spss versi 16.0:2021)

Peneliti menggunakan metode analisis faktor yaitu metode komponen utama. Dari tabel *KMO And Bartlett's Test*, diolah dari nilai *Kaiser Meyer Olkin (KMO)* sebesar 0,594. Dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai 0,5. Nilai ini menandakan data sudah valid untuk dianalisis lebih lanjut dengan analisis faktor. Nilai uji *Bartlett* sebesar 165,077 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 di bawah 0,5 %, maka matriks korelasi yang terbentuk merupakan matriks identitas, atau dengan kata lain model faktor yang digunakan sudah baik.

Selanjutnya untuk melihat variabel mana yang memiliki nilai *Communalities Correlation* di atas atau di bawah 0,5 atau di atas 50% dapat dilihat pada tabel *Communalities* berikut ini.

Tabel 4.4 communalities
Communalities

	Initial	Extraction
PDRB	1.000	.227
JUMLAH PENDUDUK	1.000	.962
DAU	1.000	.891
DAK	1.000	.613
DBH PAJAK	1.000	.868
BELANJA PEGAWAI	1.000	.925
BELANJA BARANG	1.000	.780
BELANJA SUBSIDI	1.000	.891

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Sumber: hasil pengolahan (spss versi 16.0:2021)

Hasil analisis data menunjukkan semakin besar *Communalities* sebuah variabel, berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Tabel *Communalities* menunjukkan hasil *Extraction* secara individu terdapat delapan variabel yang memiliki kontribusi yang melebihi 0,5 atau di atas 50% yaitu PDRB, JUMLAH PENDUDUK, DAU, DAK, DBH PAJAK, BELANJA

PEGAWAI, BELANJA BARANG, DAN BELANJA SUBSIDI. Namun kelayakan selanjutnya harus diuji dengan *Total Variance Explained*.

Tabel 4.5 Total Variance Explained

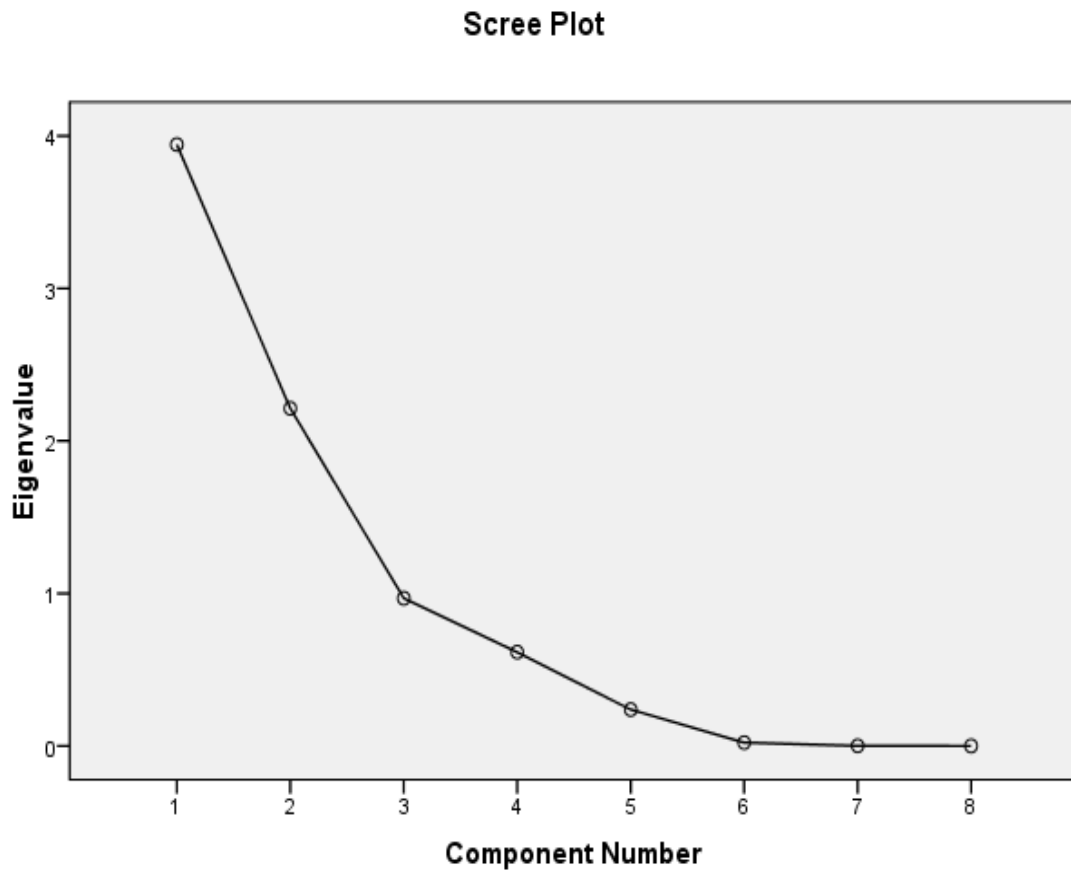
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3.943	49.289	49.289	3.943	49.289	49.289	3.287	41.093	41.093
2	2.214	27.669	76.959	2.214	27.669	76.959	2.869	35.866	76.959
3	.968	12.104	89.063						
4	.614	7.680	96.742						
5	.238	2.975	99.717						
6	.022	.271	99.988						
7	.001	.012	100.000						
8	4.917	6.146	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Sumber: hasil pengolahan (spss versi 16.0:2021)

Berdasarkan hasil dari *Total Variance Explained* pada tabel *Initial Eigenvalues*, diketahui hanya ada 2 komponen variabel yang menjadi faktor yang mempengaruhi PAD. *Eigenvalues* yang menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varians ke 8 variabel yang dianalisis. *Total Variance Explained* terlihat bahwa hanya ada dua faktor yang terbentuk. Karena kedua faktor memiliki nilai total angka *eigenvalues* di atas 1 yaitu 3,943 untuk faktor 1, dan untuk faktor 2 yaitu 2,214. Hal ini menunjukkan bahwa dua faktor adalah paling bagus untuk meringkas delapan variabel tersebut, sehingga proses *factoring* berhenti pada 2 faktor saja yang akan ikut dalam analisis selanjutnya.



Sumber: hasil pengolahan (spss versi 16.0:2021)

Gambar 4.1 scree plot

Dari gambar diatas yaitu scree plot terlihat bahwa dari faktor 1 ke 2 arah grafik menurun dengan posisi jatuh berada diangka 2, faktor 3 ke 4 dan seterusnya juga menurun sampai diangka 8. Hal ini menunjukkan bahwa 2 faktor adalah paling bagus untuk meringkas 8 variabel tersebut.

**Tabel 4.6 Component Matrix
Component Matrix^a**

	Component	
	1	2
PDRB	-.053	-.474
JUMLAH PENDUDUK	-.888	.416
DAU	.814	.478
DAK	-.536	.571
DBH PAJAK	.451	.815
BELANJA PEGAWAI	-.955	.112
BELANJA BARANG	.651	-.596
BELANJA SUBSIDI	.814	.478

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Sumber: hasil pengolahan (spss versi 16.0:2021)

Setelah diketahui bahwa dua faktor adalah jumlah yang paling optimal, maka dapat dilihat dalam tabel *Component Matrix* menunjukkan distribusi dari delapan variabel tersebut pada dua faktor yang terbentuk. Sedangkan angka-angka yang ada pada tabel tersebut adalah *Factor Loading*, yang menunjukkan besar korelasi antar suatu variabel dengan faktor 1 dan faktor 2. Proses penentuan variabel manakah yang akan masuk ke faktor yang mana, dilakukan dengan melakukan perbandingan besar korelasi pada setiap baris. Pada tabel *Component Matrix* menunjukkan korelasi di atas 0,5 pada komponen 1 yaitu DAU, DBH PAJAK, BELANJA BARANG dan BELANJA SUBSIDI. Sedangkan untuk komponen 2 yaitu JUMLAH PENDUDUK, DAU, DAK, DBH PAJAK, BELANJA PEGAWAI dan BELANJA SUBSIDI.

Selanjutnya melakukan proses faktor rotation terhadap faktor yang terbentuk. Tujuan rotasi untuk memperjelas variabel yang masuk ke dalam faktor tertentu.

Tabel 4.7 Rotated Component Matrix
Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
PDRB	-.250	-.406
JUMLAH PENDUDUK	.956	-.219
DAU	-.347	.878
DAK	.774	.120
DBH PAJAK	.146	.920
BELANJA PEGAWAI	.822	-.500
BELANJA BARANG	-.880	-.069
BELANJA SUBSIDI	-.347	.878

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser

Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Sumber: hasil pengolahan (spss versi 16.0:2021)

Pada tabel *Rotated Component Matrix* dilihat dari nilai tertinggi, maka terpilihlah dua variabel dari komponen 1 adalah JUMLAH PENDUDUK dengan nilai sebesar 0,956. Sedangkan untuk komponen 2 adalah DBH Pajak dengan nilai sebesar 0,920.

Tabel 4.8 Component Transformation Matrix
Component
Transformation Matrix

Component	1	2
1	-.788	.616
2	.616	.788

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with

Kaiser Normalization.

Sumber: hasil pengolahan (spss versi 16.0:2021)

Dari tabel *Component Transformation Matrix* terdapat angka-angka yang ada pada kolom, diantaranya *Component 1* dengan 1. *Component 2* dengan 2. Terlihat kedua angka jauh di atas 0,5. Hal ini membuktikan kedua faktor (*Component*) yang terbentuk sudah tepat, karena mempunyai korelasi tinggi. *Component matrix* hasil adalah proses rotasi (*Rotated Component Matrix*) yang memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Terlihat bahwa *Factor Loadings* yang dulunya kecil semakin diperkecil dan yang besar semakin diperbesar.

Berdasarkan hasil nilai *Component Matrix* diketahui bahwa dari 8 faktor, maka yang layak mempengaruhi PAD adalah 2 faktor yang berasal dari :

1. Komponen satu terbesar adalah JUMLAH PENDUDUK
2. Komponen kedua terbesar adalah DBH PAJAK

Setelah diketahui bahwa dari 8 faktor maka yang layak mempengaruhi PAD adalah 2 faktor yang berasal dari komponen satu JUMLAH PENDUDUK dan komponen 2 DBH PAJAK. Hal ini sama seperti hasil penelitian Gitaning Tyas dan Kurrohman (2014), yang menyatakan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk, dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Karena semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah tersebut.

Penelitian ini sama seperti hasil penelitian Magdalena, dkk (2015), yang menyatakan bahwa jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau Negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau Negara tersebut. Besarnya pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi

oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat.

Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2017), menyatakan bahwa dana bagi hasil pajak merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil pajak terdiri dari beberapa jenis yaitu pajak bumi dan bangunan, cukai hasil tembakau, pajak penghasilan. Tujuan dana bagi hasil yaitu agar memperbaiki keseimbangan pusat dengan daerah agar dapat memperhatikan potensi daerah penghasil tersebut.

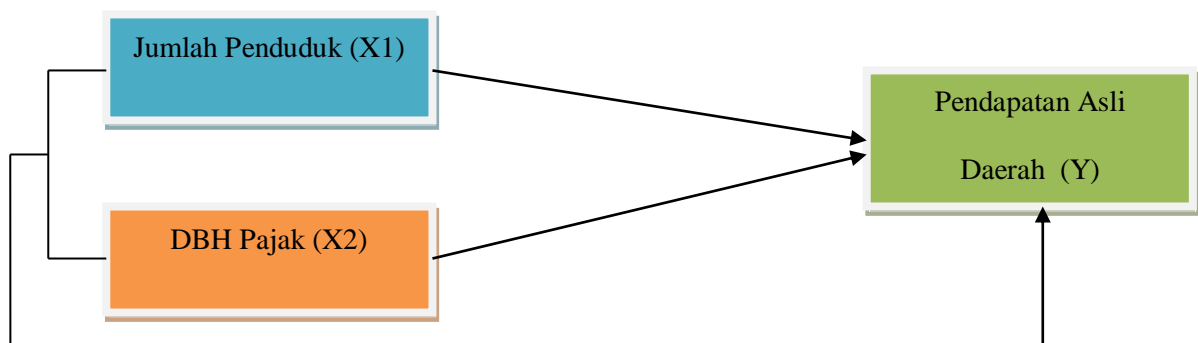
Berdasarkan hasil dari nilai Komponen Matriks diketahui bahwa ada 8 faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, maka yang layak mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu ada dua faktor yang berasal dari:

- Komponen 1 terbesar : Jumlah penduduk
- Komponen 2 terbesar : DBH pajak

Sehingga terbentuklah satu set dimensi baru yaitu model persamaan OLS atau Regresi Linier Berganda, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = a + b_1 \text{ Jumlah Penduduk} + b_2 \text{ DBH Pajak} + e$$



Gambar 4.2 Kerangka konseptual Regresi Linier Berganda

Tabel 4.9 Data Regresi Linier Berganda

Tahun	Jumlah penduduk (Orang)	DBH pajak (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2010	2.097.610	306.008.976	548.479.109
2011	2.117.224	264.364.427	1.110.469.593
2012	2.122.804	178.543.058	1.594.454.835
2013	2.135.516	193.008.107	1.578.247.819
2014	2.191.140	221.252.388	1.678.116.623
2015	2.210.624	194.712.827	1.794.704.774
2016	2.229.408	249.664.554	1.884.851.580
2017	2.247.425	257.310.464	2.031.995.548

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

3. Interpretasi Hasil Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dilakukan setelah menguji faktor-faktor CFA.

Uji regresi linier berganda ini dilakukan untuk menjawab hipotesis yang kedua dan untuk menjawabnya maka perlu dilakukan uji pengolahan data dengan menggunakan aplikasi Eviews.

Dependent Variable: PAD
 Method: Least Squares
 Date: 07/13/21 Time: 16:05
 Sample: 2010 2017
 Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.15E+10	2.05E+09	-5.629599	0.0025
JUMLAHPENDUDUK	6594.375	920.8468	7.161207	0.0008
DBHPAJAK	-5.343266	1.210052	-4.415731	0.0069
R-squared	0.940229	Mean dependent var		1.53E+09
Adjusted R-squared	0.916321	S.D. dependent var		4.80E+08
S.E. of regression	1.39E+08	Akaike info criterion		40.61753
Sum squared resid	9.66E+16	Schwarz criterion		40.64732
Log likelihood	-159.4701	Hannan-Quinn criter.		40.41661
F-statistic	39.32634	Durbin-Watson stat		1.596913
Prob(F-statistic)	0.000873			

Sumber: Hasil Pengolahan (Eviews 7, 2021)

Gambar 4.3 Hasil Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil olahan regresi linier berganda dapat diketahui persamaan sebagai berikut:

$$Y = -1,15 + 6,594 - 5,343 + e$$

Dimana:

Intercept : -1,15

Jumlah Penduduk : 6,594

DBH Pajak : -5,343

Jumlah penduduk memiliki nilai sebesar 6,594 yang artinya jika jumlah penduduk di kota Medan naik 1% maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 6,594 persen. Sedangkan untuk nilai DBH Pajak memiliki nilai sebesar -5,343 yang artinya jika DBH Pajak naik 1% maka akan mengurangi pendapatan asli daerah sebesar -5,343. Nilai intercept/konstanta sebesar -1,15 artinya, jika jumlah penduduk dan DBH Pajak tidak berkontribusi maka pendapatan asli daerah akan menurun sebesar -1,15%.

a) Hasil Uji t

Uji statistik t ini dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen yang berasumsikan variabel lain yang dianggap konstan.

1. Nilai uji t hitung untuk jumlah penduduk sebesar 7,161 dengan nilai prob sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung besar dari t tabel (2,447). Hasil tersebut membuktikan bahwa penerimaan H_a dan penolakan H_0 sehingga hipotesis ini menyatakan bahwa, jumlah penduduk berpengaruh secara parsial dan positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan diterima.

2. Nilai uji t hitung untuk DBH Pajak sebesar -4,415 dengan nilai prob sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung besar dari t tabel (2,447). Hasil tersebut membuktikan bahwa penerimaan H_a dan penolakan H_0 sehingga hipotesis ini menyatakan bahwa, DBH Pajak berpengaruh secara parsial dan negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan ditolak.

b) Hasil Uji F (Fisher)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$). Hasil F statistic atau F hitung sebesar $39,326 > F$ tabel 5,79 pada $\alpha = 5\%$.

$$Df = a (k-1), (n-k)$$

$$= 0,05 (3-1), (8-3)$$

$$= 0,05 (2), (5) \text{ maka } F \text{ tabel} = 5,79$$

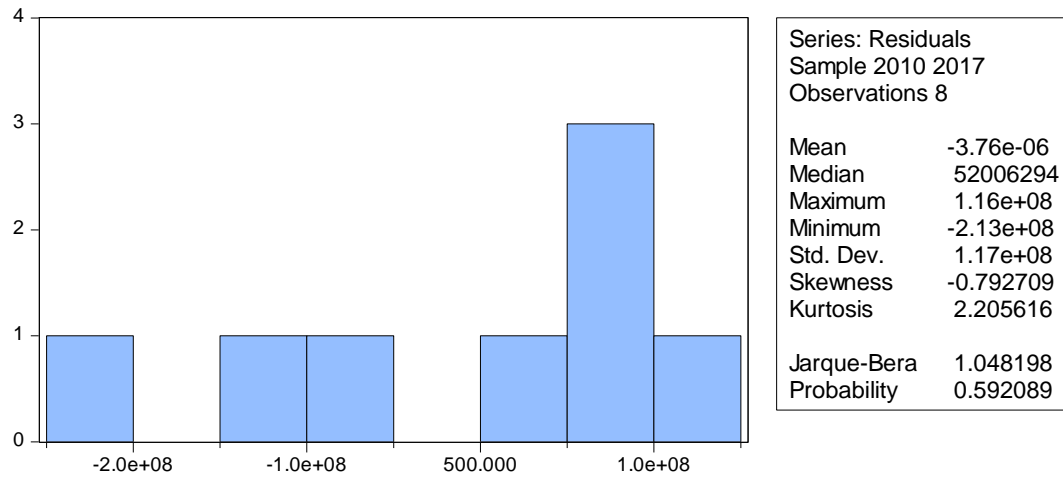
Hasil pengujian F membuktikan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Yang artinya hipotesis ini yang menyatakan bahwa jumlah penduduk dan DBH Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan diterima.

c) Hasil Uji Determinasi

Uji Koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai dari R square sebesar 0,940 yang membuktikan bahwa jumlah penduduk dan DBH Pajak mampu menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah memiliki nilai sebesar 94,0% dengan sisanya sebesar 6% variasi ini dari pendapatan asli daerah yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk kedalam model yang diteliti.

A. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah normal atau tidaknya faktor pengganggu dengan J-B test.



Sumber: Hasil Pengolahan (Eviews 7, 2021)

Gambar 4.4 Uji Normalitas JB Test

Berdasarkan hasil dari estimasi uji JB test pada tabel di atas maka diperoleh hasil nilai JB test probability sebesar $0,592 > 0,05$. Maka dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini menjelaskan bahwa model empiris yang digunakan dalam model data tersebut mempunyai residual/faktor pengganggu yang berdistribusi normal yang tidak dapat ditolak.

B. Hasil Uji Linieritas

Linieritas model adalah asumsi yang harus dipenuhi dan uji ini digunakan untuk menguji apakah ada spesifikasi linier yang ada dalam model dapat diterima atau tidak.

Ramsey RESET Test
 Equation: UNTITLED
 Specification: PAD C JUMLAHPENDUDUK DBHPAJAK
 Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	3.427770	4	0.0266
F-statistic	11.74961	(1, 4)	0.0266
Likelihood ratio	10.96417	1	0.0009

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	7.20E+16	1	7.20E+16
Restricted SSR	9.66E+16	5	1.93E+16
Unrestricted SSR	2.45E+16	4	6.13E+15
Unrestricted SSR	2.45E+16	4	6.13E+15

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-159.4701	5
Unrestricted LogL	-153.9880	4

Unrestricted Test Equation:
 Dependent Variable: PAD
 Method: Least Squares
 Date: 07/13/21 Time: 16:09
 Sample: 2010 2017
 Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.87E+10	8.01E+09	-4.830674	0.0085
JUMLAHPENDUDUK	21020.72	4240.529	4.957099	0.0077
DBHPAJAK	-14.66551	2.803781	-5.230617	0.0064
FITTED^2	-7.65E-10	2.23E-10	-3.427770	0.0266
R-squared	0.984820	Mean dependent var		1.53E+09
Adjusted R-squared	0.973434	S.D. dependent var		4.80E+08
S.E. of regression	78306495	Akaike info criterion		39.49701
Sum squared resid	2.45E+16	Schwarz criterion		39.53673
Log likelihood	-153.9880	Hannan-Quinn criter.		39.22911
F-statistic	86.49981	Durbin-Watson stat		1.674320
Prob(F-statistic)	0.000430			

Gambar 4.5 hasil Uji Linieritas

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas F hitung sebesar $0,0266 < 0,05$. Maka asumsi linieritas tidak terpenuhi, uji ini sebenarnya tidak mutlak harus digunakan karena jika teori-teori hubungan antar variabel bebas dan terikat sudah kuat maka uji linieritas tidak mutlak dipergunakan.

C. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bisa dilakukan dengan melakukan uji korelasi partial yaitu dengan membandingkan nilai $R^2_{y,x}$ dengan nilai $R^2_{x,x}$.

Hasil Persamaan rumus y c x1 x2 x3 :

Dependent Variable: PAD
Method: Least Squares
Date: 07/13/21 Time: 16:20
Sample: 2010 2017
Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.15E+10	2.05E+09	-5.629599	0.0025
JUMLAHPENDUDUK	6594.375	920.8468	7.161207	0.0008
DBHPAJAK	-5.343266	1.210052	-4.415731	0.0069
R-squared	0.940229	Mean dependent var		1.53E+09
Adjusted R-squared	0.916321	S.D. dependent var		4.80E+08
S.E. of regression	1.39E+08	Akaike info criterion		40.61753
Sum squared resid	9.66E+16	Schwarz criterion		40.64732
Log likelihood	-159.4701	Hannan-Quinn criter.		40.41661
F-statistic	39.32634	Durbin-Watson stat		1.596913
Prob(F-statistic)	0.000873			

Sumber: Hasil Pengolahan (Eviews 7, 2021)

Gambar 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil persamaan x1 c x2 :

Dependent Variable: JUMLAHPENDUDUK
Method: Least Squares
Date: 07/13/21 Time: 16:18
Sample: 2010 2017
Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2202522.	126196.2	17.45315	0.0000
DBHPAJAK	-0.000144	0.000533	-0.269930	0.7963
R-squared	0.011998	Mean dependent var		2168969.
Adjusted R-squared	-0.152669	S.D. dependent var		57389.49
S.E. of regression	61614.74	Akaike info criterion		25.10751
Sum squared resid	2.28E+10	Schwarz criterion		25.12737
Log likelihood	-98.43003	Hannan-Quinn criter.		24.97356
F-statistic	0.072862	Durbin-Watson stat		0.234278
Prob(F-statistic)	0.796258			

Sumber: Hasil Pengolahan (Eviews 7, 2021)

Gambar 4.6 Hasil Persamaan Satu

Hasil Persamaan rumus x_2 c x_1 :

Dependent Variable: DBHPAJAK
 Method: Least Squares
 Date: 07/13/21 Time: 16:22
 Sample: 2010 2017
 Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.14E+08	6.70E+08	0.617771	0.5594
JUMLAHPENDUDUK	-83.35609	308.8066	-0.269930	0.7963
R-squared	0.011998	Mean dependent var		2.33E+08
Adjusted R-squared	-0.152669	S.D. dependent var		43673258
S.E. of regression	46888669	Akaike info criterion		38.37677
Sum squared resid	1.32E+16	Schwarz criterion		38.39663
Log likelihood	-151.5071	Hannan-Quinn criter.		38.24282
F-statistic	0.072862	Durbin-Watson stat		1.069442
Prob(F-statistic)	0.796258			

Sumber: Hasil Pengolahan (Eviews 7, 2021)

Gambar 4.7 Hasil Uji Persamaan Kedua

Hasil persamaan = y c x_1 x_2 = 0,940

Hasil persamaan = x_1 c x_2 = 0,011

Hasil persamaan = x_2 c x_1 = 0,011

Nilai R-square dari x_1 dan x_2 lebih kecil dibandingkan dengan nilai R square Y yang sebesar 0,940 sehingga model empiris ini tidak ditemukan adanya masalah multikolinieritas.

D. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk pengamatan observasi yang diurutkan menurut waktu yang berada dalam data time series. Sehingga kemungkinan besar terjadinya autokorelasi diantara observasi bila berada dalam selang waktu pengamatan sangat pendek.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.860376	Prob. F(2,4)	0.4889
Obs*R-squared	2.406330	Prob. Chi-Square(2)	0.3002

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/13/21 Time: 16:24

Sample: 2010 2017

Included observations: 8

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.01E+08	9.06E+08	0.553385	0.6095
JUMLAHPENDUDUK	-232.5496	418.8657	-0.555189	0.6083
RESID(-1)	0.334600	0.453815	0.737304	0.5018
RESID(-2)	-0.660356	0.586373	-1.126170	0.3231
R-squared	0.300791	Mean dependent var		6.71E-08
Adjusted R-squared	-0.223615	S.D. dependent var		43410472
S.E. of regression	48019425	Akaike info criterion		38.51896
Sum squared resid	9.22E+15	Schwarz criterion		38.55868
Log likelihood	-150.0758	Hannan-Quinn criter.		38.25106
F-statistic	0.573584	Durbin-Watson stat		1.509296
Prob(F-statistic)	0.662013			

Gambar 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji estimasi LM Test yang diketahui nilai Obs R*Square sebesar $0,3002 > 0,05$. Yang artinya hipotesa H_0 tidak dapat ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model empiris telah terpenuhi dan tidak ditemukannya adanya autokorelasi.

C. Pembahasan

Anggaran daerah merupakan suatu rencana keuangan yang telah menjadi dasar untuk pelaksanaan pelayanan publik di suatu daerah ataupun Negara. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kabupaten/kota maupun wilayah provinsi. Dalam proses penyusunan anggaran pasca UU 32/2004 dan UU 23/2014 yang melibatkan dua pihak penyusun yaitu badan eksekutif dan badan legislative, dan masing-

masing semuanya melalui sebuah tim maupun panitia anggaran tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah yang merevisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Dimana memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit adanya campur tangan pemerintah pusat dalam menggunakan sumber-sumber keuangan yang diperoleh dari hasil pendapatan asli daerah atau pun dari pemerintah pusat, guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan daerah tersebut. Dalam hal ini, Undang-Undang memberikan penegasan yaitu setiap daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Desentralisasi Fisikal memberikan wewenang yang besar kepada setiap daerah dengan tujuan untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah tersebut, guna membiayai dana pengeluaran daerah dalam upaya rangka pelayanan publik wilayah tersebut. Pemerintah Daerah dalam upaya mengalokasikan belanja modal harus benar-benar dipergunakan sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri dengan mempertimbangkan hasil pendapatan asli daerah yang di terima di setiap tahun/bulan tersebut. Besar kecilnya belanja modal ditentukan oleh dari hasil pendapatan asli daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan untuk meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan memajukan daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, “pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Tujuannya untuk memberikan kewenangan terhadap daerah dalam menggali pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud dari desentralisasi. Pendapatan asli daerah dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis pendapatan yaitu: Pajak daerah yang dimana pendapatan daerah yang diterima dari hasil pajak. Retribusi daerah merupakan hasil dari penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah. Dan hasil perusahaan milik daerah maupun hasil dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu hasil dari pendapatan daerah yang diterima oleh hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank dan bagian laba atas pernyataan modal dan investasi. Perusahaan daerah terbagi menjadi dua kategori yaitu yang pertama perusahaan asli daerah, dimana perusahaan daerah didirikan oleh daerah itu sendiri dan kedua. Perusahaan daerah yang berasal dari pemerintah atasannya.

1. Hasil Uji Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah Dengan Menggunakan Metode Confirmatory Factor Analysis (CFA)

Nilai dari hasil KMO and Bartlett's Test nilai Kaiser Meyer Olkin 8 faktor terhadap pendapatan asli daerah yaitu 0,594. Nilai uji ini menandakan data sudah valid untuk diuji analisisnya lebih lanjut. Sedangkan uji Bartlett sebesar 165,077

dengan sig 0,000 dan dibawah 0,05%. Maka matrik korelasi atau identitas model faktor dinyatakan sudah baik. Hasil nilai data uji Comunalities sebuah variabel menunjukkan hasil extraction secara individu terdapat delapan variabel yang memiliki kontribusi yang melebihi 0,5/diatas 50%. Berdasarkan hasil dari Total Variance Explained terdapat 2 component yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dengan jumlah nilai component 1 sebesar 3,943 dan component 2 sebesar 2,214. Tentu hal ini membuktikan ada 2 faktor variabel yang bagus untuk meringkas 8 variabel tersebut. Sehingga proses factoring berhenti pada 2 faktor saja dan diikuti dengan analisis selanjutnya.

Pada gambar Scree Plot menjelaskan bahwa faktor 1 dan 2 jatuh dan menurun pada grafik 2, 3, 4 dan seterusnya sehingga sampai angka 8 menurunnya. Setelah diketahui hasil pengelolaan tersebut, maka diuji pada Component Matrix dan terlihat 2 faktor dengan nilai uji yang optimal serta mempunyai korelasi yang besar pada faktor 1 dan 2. Dimana menunjukkan korelasi diatas 0,5 pada component 1 yaitu terdiri dari variabel DAU, DBH Pajak, Belanja Barang, dan Belanja Subsidi. Untuk component 2 yaitu terdiri dari variabel Jumlah Penduduk, DAU, DAK, DBH Pajak, Belanja Pegawai, dan Belanja Subsidi. Nilai Rotated Component Matrix menjelaskan bahwa nilai tertinggi pada 8 Variabel/faktor terpilih pada Jumlah Penduduk dengan nilai 0,956, sedangkan pada nilai DBH Pajak sebesar 0,920 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian hasil dari Component Transformation Matrix 2 component 1 dan 2 terlihat kedua angka jauh diatas 0,5. Terbukti jelas bahwa faktor loadings yang dulu kecil semakin kecil dan besar semakin diperbesar. Maka data kedua faktor komponen terbentuk sudah tepat karena mempunyai korelasi tinggi. Setelah diketahui bahwa dari 8

faktor maka yang layak mempengaruhi PAD adalah 2 faktor yang berasal dari komponen satu JUMLAH PENDUDUK dan komponen 2 DBH PAJAK. Hal ini sama seperti hasil penelitian Gitaning Tyas dan Kurrohman (2014), yang menyatakan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk, dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Karena semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Magdalena, dkk (2015), yang menyatakan bahwa jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau Negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau Negara tersebut. Besarnya pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat.

2. Hasil Uji Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah Dengan Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda Setelah CFA

Nilai dari hasil jumlah penduduk memiliki nilai sebesar 6,594 yang artinya jika jumlah penduduk di kota Medan naik 1% maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 6,594 persen. Sedangkan untuk nilai DBH Pajak memiliki nilai sebesar -5,343 yang artinya jika DBH Pajak naik 1% maka akan mengurangi pendapatan asli daerah sebesar -5,343. Nilai intercept/konstanta sebesar -1,15 artinya, jika jumlah penduduk dan DBH Pajak tidak berkontribusi maka pendapatan asli daerah akan menurun sebesar -1,15%. Nilai uji t hitung untuk jumlah penduduk sebesar 7,161 dengan nilai prob sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung besar dari t tabel (2,447). Hasil

tersebut membuktikan bahwa penerimaan H_a dan penolakan H_0 sehingga hipotesis ini menyatakan bahwa, jumlah penduduk berpengaruh secara parsial dan positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan diterima. Nilai uji t hitung untuk DBH Pajak sebesar -4,415 dengan nilai prob sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung besar dari t tabel (2,447). Hasil tersebut membuktikan bahwa penerimaan H_a dan penolakan H_0 sehingga hipotesis ini menyatakan bahwa, DBH Pajak berpengaruh secara parsial dan negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan ditolak. Hasil F statistic atau F hitung sebesar $39,326 > F$ tabel 5,79 pada $\alpha = 5\%$.

$$\begin{aligned} Df &= a(k-1), (n-k) \\ &= 0,05(3-1), (8-3) \\ &= 0,05(2), (5) \text{ maka } F \text{ tabel} = 5,79 \end{aligned}$$

Hasil pengujian F membuktikan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Yang artinya hipotesis ini yang menyatakan bahwa jumlah penduduk dan DBH Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan diterima. Nilai dari R square sebesar 0,940 yang membuktikan bahwa jumlah penduduk dan DBH Pajak mampu menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah memiliki nilai sebesar 94,0% dengan sisanya sebesar 6% variasi ini dari pendapatan asli daerah yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk kedalam model yang diteliti. Berdasarkan hasil dari estimasi uji JB test pada tabel maka diperoleh hasil nilai JB test probability sebesar $0,592 > 0,05$. Maka dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini menjelaskan bahwa model empiris yang digunakan dalam model data tersebut mempunyai residual/faktor pengganggu yang berdistribusi normal yang tidak dapat ditolak.

$$\text{Hasil persamaan } = y \text{ c } x_1 \text{ x}_2 = 0,940$$

$$\text{Hasil persamaan } = x_1 \text{ c } x_2 = 0,011$$

$$\text{Hasil persamaan } = x_2 \text{ c } x_1 = 0,011$$

Nilai R-square dari x_1 dan x_2 lebih kecil dibandingkan dengan nilai R square Y yang sebesar 0,940 sehingga model empiris ini tidak ditemukan adanya masalah multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji estimasi LM Test yang diketahui nilai Obs R*Square sebesar $0,3002 > 0,05$. Yang artinya hipotesa H_0 tidak dapat ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model empiris telah terpenuhi dan tidak ditemukannya adanya autokorelasi.

Hal ini sama seperti hasil penelitian Gitaning Tyas dan Kurrohman (2014), yang menyatakan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk, dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Karena semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah tersebut. Penduduk dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka akan meningkatkan permintaan barang-barang konsumsi. Hal ini akan menyebabkan mendorongnya peningkatan produksi sehingga akan membuat penambahan perluasan usaha dan pendirian usaha baru dalam sektor produksi. Sehingga akan membuat peningkatan pendapatan masyarakat dan masyarakat dapat membayar pajak bumi, bangunan, maupun pajak dari hasil pemakaian sumber daya terhadap pemerintah.

Hal ini sejalan dengan riset Prana (2016), yang menyatakan bahwa variabel pajak sebelumnya berpengaruh signifikan dan pengeluaran masyarakat atau konsumsi akan mempengaruhi pajak secara signifikan. Yang dimana pajak

merupakan sumber pendapatan yang terbesar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung jika konsumsi masyarakat menurun maka akan menurun pula pajak daerah tersebut. Dan jika konsumsi masyarakat meningkat maka pajak daerah malah sebaliknya. Tentu hal ini akan membuat meningkatnya pendapatan asli daerah, dengan semakin meningkat pajak yang dihasilkan maka semakin besar pula dana yang diperoleh pada kota Medan tersebut.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian riset Effendi dan Harahap (2020), yang menyatakan bahwa pajak parker dan kontribusi pajak parkir memiliki hubungan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Dispenda Kota Batam. Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2017), menyatakan bahwa dana bagi hasil pajak merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil pajak terdiri dari beberapa jenis yaitu pajak bumi dan bangunan, cukai hasil tembakau, pajak penghasilan. Tujuan dana bagi hasil yaitu agar memperbaiki keseimbangan pusat dengan daerah agar dapat memperhatikan potensi daerah penghasil tersebut.

Dana bagi hasil/DBH Pajak bersumber dari sumber daya alam dan bagian dari hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. DBH merupakan dana perimbangan yang sifatnya block grant yaitu penggunaan dana diberikan kepada daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tentu hal ini akan membantu meningkatnya pendapatan asli daerah yang mana semakin tinggi pajak yang dihasilkan maka akan semakin besar pula dana yang diperoleh Pemerintahan Kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun beberapa kesimpulan yang ditarik dari hasil pembahasan uji analisis data pada 8 faktor-faktor variabel bebas terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan 8 variabel (pdrb, jumlah penduduk, dau, dak, dbh pajak, belanja pegawai, belanja barang dan belanja subsidi) terhadap pendapatan asli daerah secara uji *Confirmatory Factor Analysis*. Maka yang layak mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah dua faktor yang berasal dari variabel jumlah penduduk dan pajak. Dimana nilai pada kedua variabel tersebut memperoleh jumlah nilai yang paling besar diantara kedelapan faktor tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji pada tabel *Comunalities, Total Variance Explained, Component Matrix Dan Rotated Component Matrix*.
2. Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda pada jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah yang memiliki nilai sebesar 6,594. Sedangkan dbh pajak memiliki nilai sebesar -5,343 terhadap pendapatan asli daerah. Untuk hasil uji t menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara parsial dan positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan. Namun, hasil pada pajak menyatakan bahwa dbh pajak berpengaruh signifikan terhadap

pendapatan asli daerah di kota Medan. Dimana hasil uji F yang telah dilakukan menyatakan telah membuktikan bahwa jumlah penduduk dan dbh pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan dari hasil penelitian maka muncullah beberapa saran dari penelitian tersebut yakni:

1. Ada baiknya jika Pemerintah kota Medan memperhatikan hasil penerimaan pajak yang dihasilkan oleh pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, serta pajak hasil cukai tembakau. Guna untuk meningkatkan hasil pendapatan asli daerah di Kota Medan.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Medan bertindak lebih cepat dalam menanggapi jumlah penduduk di kota Medan setiap tahunnya, karena dengan membuat sebuah kebijakan strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pengembangan teknologi, investasi, dan penggunaan sumber daya dapat memperoleh penghasilan daerah yang meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut khususnya di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Abdul, M, Aris Soelistiyo. (2017). *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Adi, Hari Priyo,(2006). *Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah studi pada Kab/Kota se Jawa bali*. SNA VI. Padang. (diakses tanggal 06 Agustus 2015)
- Ardhani, Pungky, (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Akhmad Imam Amrozi, (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Pemerintah Daerah*.*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Asriani, dkk. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal*. Makassar: STIE AMKOP Makasaar.
- Atmaja, A. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Semarang*. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Gustiana, A. (2014). *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Gunantara, Putu Candra & Dwirandra, A. A. N. B, (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali*. *E-Jurnal Akuntansi*: Universitas Udayana.

- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Kasyati, (2015). *Pengaruh DAU, DAK, PAD, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil dan Kemandirian fiskal Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kadafi, EM. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (studi kasus pada pemerintahan kota bandung)*. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama.
- Lestari, S. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Soppeng Periode 2005-2014*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Lisa, Y, dkk. (2017). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di indonesia*. Jurnal. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Muktiawan, FF. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Empiris pada pemerintah Kota pulau Jawa)*. Tesis. Surakarta: Universitas Muhammdiyah Surakarta.
- Mulya Zulfan, (2016). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Aceh*. Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Syiah Kuala Darussalam – Banda Aceh.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.

- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Rahayu, S, Eka Safitri Magdalena Ginting, (2017). *Pengaruh Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum Pada Pemerintah Kota Medan. Jurnal*. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Sugiyanta, (2016). *Analisis Belanja Modal Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jurnal Akuntansi*. Surakarta: Universitas Jember.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Simanjuntak, (2001). *Analisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Tesis*. Medan. (diakses tanggal 17 Oktober 2015)

- Utami, RR. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Belanja Modal*. Jurnal. Cimahi: Universitas Komputer Indonesia.
- Walidi,(2009). *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara)*. Tesis. Sekolah Pascasarjana: Universitas Sumatera Utara.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Zam zam, K. (2016). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Angkatan Kerja, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Solo Raya Periode 2000-2014*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Azhari, Wina. (2019). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Sosial Sains, Program Studi Akuntansi. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Prawira, Taufiq Muji. (2018). *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Medan: Prodi Ekonomi Pembangunan. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Todaro. M.P, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ke Tiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Edisi 4.
- Sukirno, Sadono. (1985). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit FEUI.
- Fadillah, Murti. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Silastri, Novri. (2017). *Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kuantan Singingi*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Volume 4, No 1. Pekanbaru. Indonesia.
- Prana, Rezeki Riandani. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi*. Jurnal Iman. Vol. 4. No.1. Pp. 74-48. Februari 2016. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Effendi, Syahril, Dan Harahap Baru. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam*. Suistek 3. 25 September 2020. Universitas Putra Batam. Batam.